

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017-2019 ini berfokus pada pengaruh pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan pembahasan hasil analisis di bab sebelumnya penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pendidikan melalui rata-rata lama sekolah memberikan hasil yang berbeda dengan hipotesis dalam penelitian ini karena rata-rata lama sekolah ternyata memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia tahun 2017-2019 yang artinya meningkatnya rata-rata lama sekolah tidak memberikan pengaruh untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Sedangkan pendidikan melalui Angka Buta Huruf memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa peningkatan angka buta huruf dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

2. Variabel tingkat kesehatan memiliki hasil yang sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini, yakni angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia tahun 2017-2019.
3. Variabel Infrastruktur melalui rasio kepadatan jalan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia tahun 2017-2019. Hasil ini tidak sesuai hipotesis yang menyatakan bahwa kepadatan jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti di atas, adapun implikasi yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peningkatan pendidikan melalui rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia pada tahun 2017-2019. Namun meningkatkan pendidikan melalui penurunan angka buta huruf dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
2. Upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup memberikan dampak berkurangnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

3. Meningkatnya kepadatan jalan di 34 provinsi di Indonesia selama tiga tahun yakni tahun 2017-2019 tersebut tidak memberikan pengaruh untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

### **C. Saran**

Ketimpangan pembangunan antar wilayah memang merupakan aspek umum yang terjadi saat melakukan kegiatan ekonomi di setiap wilayah. Memberantas ketimpangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan karena terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah dapat berimplikasi ke berbagai aspek di suatu negara baik dalam bidang sosial sampai bidang keamanan. Berikut beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara lain:

1. Upaya pemerintah dalam memperbaiki pendidikan dengan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah belum mampu untuk menurunkan ketimpangan pembangunan karena terlalu kecilnya nilai yang meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya lebih keras dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah agar dapat sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki kualitas pendidikan dengan memberlakukan program-program yang dapat memberantas buta huruf di suatu wilayah agar dapat membuat masyarakat lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan sehingga mengecilnya persentase

buta huruf dapat mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia.

2. Dalam bidang kesehatan pemerintah hendaknya mendorong usaha untuk meningkatkan angka harapan hidup setiap daerahnya seperti meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi angka kematian bayi, dan meningkatkan fasilitas umum agar upaya memperkecil kesenjangan pembangunan dapat terlaksana.
3. Dalam melakukan pembangunan jalan sebagai salah satu pengadaan infrastruktur pemerintah perlu memperhatikan kriteria yang tepat dalam merencanakan pembangunan sehingga pembangunan jalan tepat sasaran. Selain itu, hendaknya pemerintah memprioritaskan perbaikan jalandengan kondisi yang rusak dan rusak berat sehingga jalan yang telah tersedia dapat memberikan manfaat yang lebih besar.